

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI PECANDU  
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF Keadilan Restoratif  
(STUDI PUTUSAN PT SEMARANG NOMOR 217/PID.SUS/2017/PT SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Rafindra Fahrezy Adyatma  
21.C1.0052

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2026**

## ABSTRAK

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kedaulatan negara dan kualitas generasi bangsa, sehingga penanganannya memerlukan upaya komprehensif. Meski narkoba sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna bertujuan mengembalikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan memprioritaskan rehabilitasi medis dan sosial guna mewujudkan kemanfaatan serta kepastian hukum yang berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam perspektif keadilan restoratif studi Putusan PT Semarang Nomor 217/Pid.Sus/2017/PT Smg dan untuk menganalisis kendala dalam menerapkan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelitian hukum empiris, pengolahan data mencakup editing, coding, dan sistematikasi/tabulasi data, sementara penyajian data bertujuan agar mudah dipahami melalui uraian naratif dengan metode utama pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengungkap fakta hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam perspektif keadilan restoratif studi Putusan PT Semarang Nomor 217/Pid.Sus/2017/PT Smg dikatakan efektif karena adanya pemisahan yang jelas antara pelaku (pedangar/jaringan) dan korban (pemakai/pecandu) yang diatur dalam undang-undang, serta proses penentuan status melalui TAT. Dikatakan efektif karena adanya landasan undang-undang yang membedakan secara tegas antara pedangar (yang harus dihukum berat) dan korban (yang harus direhabilitasi) adalah kunci. Kendala dalam Menerapkan Program Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba di Kota Semarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat, belum optimalnya fasilitas rehabilitasi, keterbatasan fasilitas fisik dan kurangnya koordinasi,

Berdasarkan kendala yang dihadapi perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak memiliki stigma negatif terhadap pecandu narkoba dan dapat berperan serta dalam memotivasi pecandu narkoba. Perlunya pengupayaan fasilitas penunjang yang lebih lengkap seperti penyediaan *bed* agar ketersediaan *bed* bagi pasien pecandu narkoba dapat tercukupi. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* (BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat) dengan mengadakan pertemuan agar terjalin kerjasama yang harmonis, solid dan memiliki tujuan yang sama dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Perspektif Keadilan Restoratif, Putusan Pengadilan Negeri

## **ABSTRACT**

*Drug crimes are extraordinary crimes that threaten state sovereignty and the quality of the nation's future. Therefore, addressing them requires comprehensive efforts. Although drug abuse is often considered a victimless crime, the application of restorative justice for drug abusers aims to restore criminal law as the ultimum remedium by prioritizing medical and social rehabilitation to achieve benefits and legal certainty based on justice. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for drug addicts from a restorative justice perspective, including the Semarang District Court Decision Number 217/Pid.Sus/2017/PT Smg and to analyze the obstacles in implementing rehabilitation programs for drug addicts in Semarang City.*

*The research method used is qualitative. The approach used in this study is a normative juridical approach. The specifications used in this study are descriptive analytical. The author conducted research at the Semarang District Court, with the object of the research being the Semarang District Court Decision Number 217/Pid.Sus/2017/PT Smg. This legal research is normative legal research. Data collection techniques include a literature review of legal materials, including primary, secondary, tertiary, and/or non-legal materials. Empirical legal research involves data processing, editing, coding, and systematizing/tabulating data. Data presentation aims to facilitate understanding through narrative descriptions, charts, tables (numbers/percentages if quantitative), or flowcharts. The primary data collection methods are observation, interviews, and documentation to uncover legal facts in the community.*

*The results indicate that the rehabilitation program for drug addicts, from a restorative justice perspective, based on the Semarang District Court Decision No. 217/Pid.Sus/2017/PT Smg, is considered effective due to the clear separation between perpetrators (dealers/networks) and victims (users/addicts) as regulated by law, as well as the status determination process through the TAT (Rehabilitation and Rehabilitation Procedure). Effectiveness is considered due to the legal basis that clearly differentiates between dealers (who must be severely punished) and victims (who must be rehabilitated). Obstacles to implementing rehabilitation programs for drug addicts in Semarang City include a lack of public understanding, suboptimal rehabilitation facilities, limited physical facilities, and a lack of coordination.*

*Based on the challenges faced, public education is needed to eliminate the negative stigma against drug addicts and to encourage them to participate in motivating drug addicts. Efforts are needed to provide more complete supporting facilities, such as providing beds, to ensure sufficient bed availability for drug addicts. Improve coordination between stakeholders (BNN, Police, Prosecutor's Office, Health Service, rehabilitation institutions, and the community) by holding meetings to foster harmonious, solid cooperation and a shared goal of rehabilitating drug addicts.*

**Keywords:** *Rehabilitation, Drug Addicts, Restorative Justice Perspective, District Court Decisions*